

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor industri selain mempunyai dampak positif terhadap kondisi perekonomian di suatu negara, juga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan di negara tersebut. Aktivitas operasional perusahaan disinyalir berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di sekitar wilayah produksi tersebut (Ridwan, 2010). Kerusakan tersebut terjadi akibat aktivitas industri ekstraktif yang menyebabkan pencemaran lingkungan mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan proses produksi dilaksanakan. Aktivitas industri juga mengakibatkan kerusakan tanah, rusaknya ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi suara (Walhi, 2019).

Dampak kegiatan produksi perusahaan terhadap kerusakan lingkungan telah menjadi fenomena di banyak negara. Dalam konteks Indonesia, kasus PT. Lapindo Brantas Sidoarjo menunjukkan rusaknya sistem lingkungan oleh perilaku eksploitasi sumber daya yang melampaui batas. Kasus Lapindo ini mengakibatkan lebih dari 11 desa, pabrik, sekolah dan berbagai fasilitas umum lainnya terendam lumpur panas dan menjadi tidak berfungsi (Tempo, 2012; Mongabay, 2013; Kompas, 2014). Selain itu, kasus penggundulan hutan yang mayoritas dimiliki oleh korporasi, mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia seperti Riau dan Kalimantan mengalami kebakaran hutan hampir setiap tahun (Mongabay, 2012).

Data yang bersumber dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus lingkungan hidup yang paling besar berasal dari kasus pencemaran lingkungan. Pencemaran ini mengakibatkan kondisi lingkungan Indonesia berada dalam kategori darurat ekologis (Walhi, 2018). Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dan mekanisme untuk menghindari kerusakan yang lebih masif.

Salah satu upaya untuk mengurangi dampak kegiatan produksi perusahaan terhadap kerusakan lingkungan adalah melalui pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) oleh setiap perusahaan (Akbas dan Canikli, 2016). Pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan dapat mengungkapkan kinerja lingkungan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Dengan adanya pengungkapan lingkungan menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Nurleli, 2016). Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) juga merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Melalui pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan, masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Effendi *et al.*, 2012). Wailanduw (2017) juga menjelaskan bahwa *environmental disclosure* merupakan pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam di lingkungan perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi, namun juga membantu dalam memecahkan permasalahan terkait resiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkup hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) (GRI, 2013).

Terdapat beberapa media yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan laporan lingkungan, seperti laporan tahunan (*annual report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan *website* perusahaan. Namun berbagai media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan di Indonesia dalam pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain; pengungkapan informasi lingkungan yang masih bersifat sukarela (Supatminingsih dan Wicaksono, 2016), serta lemahnya aturan tentang kelestarian lingkungan (Tijow, 2013).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas dan memperkuat pengungkapan lingkungan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Vira dan Wirakusuma, 2019). Terdapat 5 asas yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (KNKG, 2006). Kelima asas tersebut memiliki peran yang sentral dalam implementasi *good governance* di Indonesia. Implementasi *good governance* ini juga akan berdampak pada meningkatnya pelaksanaan dan pengungkapan atas tanggung jawab sosial perusahaan (Achmad, 2008). Kerangka *corporate governance* juga memastikan bahwa *disclosure* suatu perusahaan harus tepat waktu dan akurat (OECD, 2004)

Informasi lingkungan yang disajikan oleh manajemen ditujukan kepada *board of director* dan *shareholder* untuk pengambilan keputusan (Millstein, 1991 dalam Rupley *et al.*, 2012). Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan akan mengkomunikasikan informasi ke *stakeholder* untuk menyesuaikan dengan harapan masyarakat (Rupley *et al.*, 2012). Pengungkapan informasi lingkungan juga dapat melindungi *stakeholder* dari perilaku oportunistik manajer sebagai agen dalam perusahaan. Pengungkapan informasi yang lebih luas juga merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal* (Solikhah dan Winarsih, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya (Rupley *et al.*, 2012; Rao *et al.*, 2012; Solikhah dan Winarsih, 2016) menemukan bahwa *corporate governance* dapat menjadi faktor penentu perusahaan dalam melakukan praktik *environmental disclosure*. Hal ini dapat terjadi karena *environmental disclosure* merupakan hasil dari kebijakan para manajer, dewan (*board*), ataupun seluruh jajaran struktural yang ada dalam suatu perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif juga ditemukan dapat meningkatkan pengungkapan suatu perusahaan (Cormier dan Magnan, 2014). Allegrini dan Greco (2013) juga menemukan bahwa adanya aktivitas monitoring yang baik sebagai bagian dari *corporate governance* dapat meningkatkan transparansi melalui pengungkapan sukarela.

Pengaruh *corporate governance* dengan menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dewan komisaris perempuan dalam komisaris serta komposisi kepemilikan dalam mengungkapkan informasi lingkungan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya (Solikhah dan Winarsih, 2016). Namun hasil

penelitian yang ada masih belum konsisten. Beberapa peneliti menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (Rupley *et al.*, 2012; Fatimah *et al.*, 2016; Akbas, 2016; Kabra, 2017; Emmanuel *et al.*, 2018). Akan tetapi, dalam penelitian Djajadikerta dan Trireksani (2012) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Villiers *et al.*, 2009; Rao *et al.*, 2012; Paramita, 2014; Nainggolan dan Rohman, 2015; Solikhah dan Winarsih, 2016; Rafique *et al.*, 2017; Emmanuel *et al.*, 2018) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Hal ini terjadi karena komisaris independen merupakan bagian penting dalam struktur tata kelola sebuah perusahaan. Dewan komisaris independen bersikap netral terhadap segala kebijakan dan aturan serta sebagai wakil masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan lingkungan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Sulistiyowati, 2014; Akbas, 2016; Djajadikerta dan Trireksani, 2016). Hal ini terjadi karena kapabilitas komisaris independen dalam rangka monitoring juga akan terbatas apabila pihak lain mendominasi dewan komisaris (Akbas dan Canikli, 2016).

Penelitian tentang dewan komisaris perempuan sudah pernah dilakukan di Indonesia namun masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa dewan komisaris perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan (Paramita, 2014). Temuan ini menjelaskan dewan komisaris perempuan lebih cenderung membuat

rapat dewan dan pola kehadiran yang khusus pada pertemuan dewan komisaris, dimana membuat dewan komisaris yang berbeda lebih sukses dibandingkan dewan komisaris yang homogen. Berbeda dengan temuan Solikhah dan Winarsih (2016) menjelaskan tanpa adanya anggota dewan komisaris perempuan, perusahaan tetap berjalan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengungkapan laporan lingkungannya.

Selain karakteristik dewan komisaris di atas, beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan lingkungan (Villiers *et al.*, 2009; Rao *et al.*, 2012; Sulistyowati, 2014; Nainggolan dan Rohman, 2015; Kabra, 2017; Rafique *et al.*, 2017; Emmanuel *et al.*, 2018). Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap perusahaan agar tidak melakukan penyimpangan, baik dalam hal aktivitas terhadap masyarakat maupun lingkungan. Namun hasil yang berbeda (Rupley *et al.*, 2012; Paramita, 2014; Solikhah dan Winarsih, 2016). Kepemilikan institusional (pemegang saham mayoritas) tidak memperhatikan pengungkapan informasi sukarela (pengungkapan lingkungan) pada laporan tahunan (Solikhah dan Winarsih, 2016).

Penelitian di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*, menyebabkan penelitian lanjutan penting dilakukan. Penelitian ini mencoba untuk memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan *environmental disclosure index scorecard*. Penelitian menggunakan *environmental disclosure index scorecard* pertama kali dilakukan Solikhah dan

Winarsih (2016) di Indonesia. Akan tetapi dalam penelitian Solikhah dan Winarsih (2016) masih menggunakan pedoman pengukuran pada GRI G3, sedangkan penelitian ini menggunakan pengukuran dengan GRI G4 sesuai dengan GRI yang berlaku umum saat penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menambahkan 21 indikator baru yang disesuaikan dengan pengungkapan lingkungan yang diungkapkan perusahaan sesuai dengan GRI G4. Selain itu, penelitian dengan topik *environmental disclosure* memberikan gambaran pentingnya praktik *environmental disclosure* yang dilakukan perusahaan. Penelitian mengenai pengungkapan lingkungan juga dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan lingkungan.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan Sulistyowati (2014) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* menggunakan pengukuran GRI G3. Penelitian ini melanjutkan dengan menggunakan *environmental disclosure index scorecard*. *Environmental disclosure index scorecard* lebih menjabarkan isi dari indikator GRI karena telah dikelompokkan pada empat kategori pengungkapan, yaitu kepatuhan, pencegahan polusi, penanganan produk dan pengembangan berkelanjutan.

Selain uraian di atas, penelitian ini berfokus pada *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur untuk periode tahun 2015-2017. Pertama, perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena aktivitas industri manufaktur mempunyai dampak besar pada terjadinya kerusakan lingkungan seperti polusi udara, air, penurunan kualitas tanah, *global warming*, dan lain

sebagainya (Burgwal dan Viera, 2014; Nurhayati *et al.*, 2015). Periode tahun 2015-2017 dipilih karena pada periode tahun ini sebagian besar perusahaan sudah menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 dan data perusahaan pada periode tahun ini mudah diakses serta data tersedia. Kedua, variabel independen yang digunakan adalah struktur *corporate governance* yang diprosikan oleh (ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dewan komisaris perempuan, dan kepemilikan institusional). Variabel independen *corporate governance* digunakan karena *environmental disclosure* merupakan hasil dari kebijakan para manajer, dewan (*board*), atau seluruh jajaran struktural yang ada didalam perusahaan (Rao *et al.*, 2012). Ketiga, indikator pengukuran *environmental disclosure* pada penelitian ini menggunakan *environmental disclosure index scorecard* yang tetap berpedoman pada indeks *Global Reporting Initiative* (GRI) G4<sup>1</sup>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dewan komisaris merupakan mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*) (Michelon dan Parbonetti, 2010). Ukuran dewan komisaris dapat memainkan peran yang penting dalam memantau kinerja dalam suatu perusahaan (Paramita, 2014). Komisaris independen merupakan bagian dari *corporate governance* yang dapat dikaitkan dengan pengungkapan lingkungan (Solikhah dan Winarsih, 2016). Komisaris

---

<sup>1</sup> *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 adalah indeks pengukuran indikator pengungkapan lingkungan yang berlaku global.



independen juga diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, seperti pemegang saham minoritas (Prasentianti, 2014). Hal ini disebabkan komisaris independen berdasarkan POJK No.33/POJK.04/2014 adalah pihak yang tidak langsung berkaitan dengan usaha emiten. Tingkat kemajemukan dalam suatu dewan juga memberikan pengaruh dalam keputusan maupun kegiatan yang dijalankan perusahaan (Rao *et al.*, 2012). Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut dirumuskan permasalahan **pertama**, apakah karakteristik dewan komisaris (ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan komisaris perempuan) berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan, dan institusi lainnya (Rupley *et al.*, 2016). Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan dalam laporan tahunannya, sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholders* untuk mendapatkan legitimasi dan nilai perusahaan (Sudarno, 2013). Oleh karena itu, dirumuskan masalah penelitian **kedua**, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris (ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan komisaris perempuan) terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional (*institutional ownership*) terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademis dengan memberikan bukti empiris pengaruh struktur *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan mengembangkan pengukuran indikator *environmental disclosure index scorecard*, yaitu dengan menambahkan 21 indikator pengungkapan lingkungan sesuai dengan temuan penelitian yang tetap berdasarkan GRI.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan masukan bagi perusahaan terkait dengan perlunya pengungkapan informasi tanggung jawab lingkungan kepada publik di dalam laporan tahunan perusahaan dan *sustainability report*.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I: PENDAHULUAN

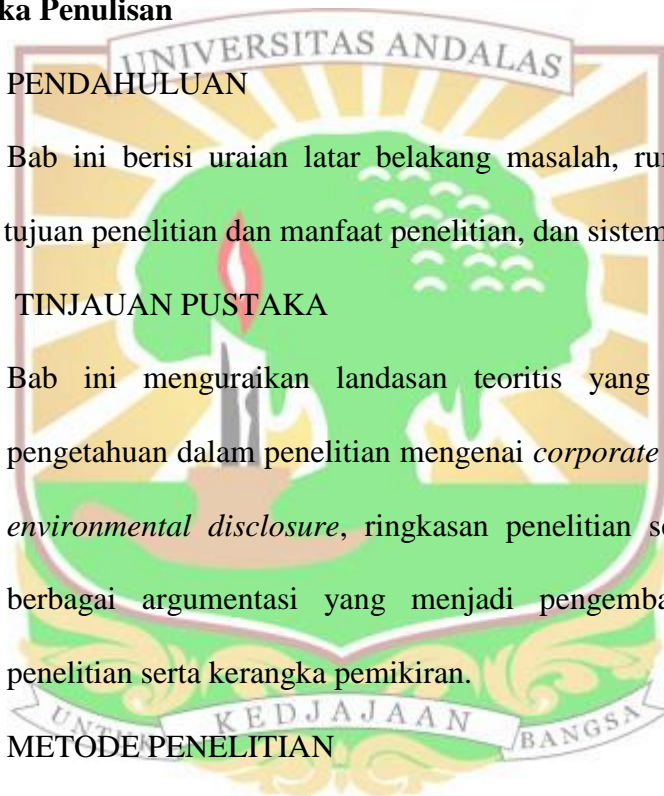
Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar pengetahuan dalam penelitian mengenai *corporate governance* dan *environmental disclosure*, ringkasan penelitian sebelumnya, dan berbagai argumentasi yang menjadi pengembangan hipotesis penelitian serta kerangka pemikiran.

#### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan, yaitu menguraikan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.



**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah bab yang berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan mengenai deskripsi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan hasil pengujian dan analisis data, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian.

